

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini dapat disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2025 – 2030 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Sosial disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta penutup.

Pada penyusunan RENJA Tahun 2026 Dinas Sosial ini bertujuan :

1. Sebagai Instruksi dan acuan untuk pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.
2. Menjadi Standar dan tolok ukur dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bogor.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan RENJA Tahun 2026 ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan RENJA Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Bogor pada Tahun-tahun berikutnya.

Cibinong, 07 Agustus 2025

Kepala Dinas Sosial



Farid Marip, S.H., M.Hum.

Pembina TK. I / IVb

NIP. 19761231 2002121014

DAFTAR ISI

	Halaman:
Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
Lampiran	IV
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	15
1.3. Maksud dan Tujuan	20
1.3.1. Maksud.....	20
1.3.2. Tujuan.....	21
1.4. Sistematika Penulisan	21
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD	22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	93
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	96
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	128
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat....	160
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	162
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2026.....	171
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.....	173
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	190
BAB V : PENUTUP.....	
	203

DAFTAR TABEL

Halaman:

Tabel 1.1 : Keterkaitan Renja terhadap RKPD Tahun 2026.....	5
Tabel 1.2 : Pencapaian target sasaran daerah Tahun 2026.....	6
Tabel 1.3 : Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026	12
Tabel 1.4 : Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	13
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d Tahun 2026	23
Tabel 2.2 : Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2024.....	93
Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bogor	101
Tabel 2.4 : Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bogor	129
Tabel 3.1 : Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	165
Tabel 3.2 : Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026	166
Tabel 3.3 : Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional.....	170
Tabel 3.4 : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026	173
Tabel 3.5 : Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.....	174
Tabel 4.1 : Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026	192

LAMPIRAN	:	PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR	:	24 TAHUN 2025
TANGGAL	:	07 AGUSTUS 2025
TENTANG	:	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Sosial adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial disusun secara simultan bersamaan dengan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga pada setiap tahapannya diharapkan terdapat konsistensi antar kedua dokumen tersebut.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, dengan mengusung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”. Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2026 telah menjadi bagian penting dalam substansi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, meskipun pada saat penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2026, dokumen RPJMD masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, Renja Dinas Sosial secara substansi telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan sebagaimana RPJMD Tahun 2025-2029.

Mengingat aturan tahunan dalam proses penyusunan Renja Dinas Sosial yang disusun secara bersamaan dengan RKPD tahun 2026 belum terbit, serta dalam rangka memberikan panduan bagi perangkat daerah agar penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, maka disusunlah pedoman penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2026 ini. Tata cara penyusunan masih memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses Penyusunan Renja Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja
- Penyiapan Data dan Informasi.

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja

- Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja

- Penyusunan Rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja setelah dilakukan review oleh Tim RKPD
- Rancangan Renja dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD.
- Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

d) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

e) Perumusan Rancangan Akhir Renja

Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan Perwali tentang RKPD.

f) Penetapan Renja.

Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Tabel 1.1

Keterkaitan Renja terhadap RKPD Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OUTCOME		TARGET	
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya kapasitas PSKS dalam Penanganan PPKS	Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan pendampingan atau fasilitasi PSKS	100	%
Pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Tertanganinya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	100	%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya kebutuhan PPKS di luar panti	Persentase Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Pengemis/Gelandangan di luar panti yang terehabilitasi sosial	29,55	%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam perlindungan dan atau jaminan sosial	74,17	%
		Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang terfasilitasi dalam program kesejahteraan sosial		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana	100	%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	100	%

2. Pencapaian Target Sasaran

Tabel 1.2
Pencapaian target sasaran daerah Tahun 2026

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
			Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Cakupan pelayanan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi	23,18	%	Tujuan : Meningkatnya taraf hidup masyarakat			
							Sasaran : Menurunnya kemiskinan	Angka kemiskinan	6,24 - 6,79	%
							Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,92-7,54	%

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
			Sasaran : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya	42,22	%				
			Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan	Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha	3,69	%				

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	- Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan pendampingan atau fasilitasi PSKS			100	%				
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	'Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	- Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani -			100	%				

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Persentase Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Pengemis/ Gelandangan di luar panti yang terehabilitasi sosial			29,55	%				
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial			32,95	%				

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Fakir Miskin	- Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi jaminan dan atau perlindungan sosial			58,37	%				
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	- Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana			100	%				
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	- Tingkat pengelolaan Taman Makam Pahlawan			100	%				

Penyusunan Renja Tahun 2026 mengacu dan mempedomani Perubahan Renstra 2024–2026 sehingga sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 ini secara khusus membahas konsep rencana peningkatan kualitas pelayanan sosial dan Penanganan kesejahteraan PSKS yang akan dilaksanakan, sehingga akan menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memadukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan sosial, baik yang berskala nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Adapun program strategis dalam melaksanakan misi daerah, Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2026 antara lain:

1. Misi ke-3 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan. Prioritas yang akan dilaksanakan peningkatan ketahanan bencana terkait Penguatan kesiapsiagaan bencana.

Program prioritas yang mendukung misi tersebut adalah Program Penanganan Bencana.

2. Misi ke-4 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Prioritas yang akan dilaksanakan aksesibilitas pendidikan dasar terkait pemberian dukungan sekolah rakyat.

Program prioritas yang mendukung misi tersebut adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3. Misi ke-5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Prioritas yang akan dilaksanakan Penurunan kemiskinan melalui skema graduasi dan perluasan kesempatan kerja. Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan mata pencaharian, dan pendampingan intensif masyarakat miskin dan rentan miskin. dan Peningkatan aksesibilitas bagi disabilitas Prioritas ini dilaksanakan selama tahun 2025-2030 dalam bentuk merehabilitasi dan mengoptimalkan fungsi Balai Kesejahteraan Sosial (BKS), Pengembangan Wisma Istimewa untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, sandang dan antar jemput klien dan Pemberian alat bantu untuk disabilitas.

Program prioritas yang mendukung misi tersebut adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Pemberdayaan Sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
44. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam satu tahun anggaran. Disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah sebagaipedomannya dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2026;

2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026;
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, berisi uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan dan menguraikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.

Bab V : Penutup

Berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada penyusunan Renja tahap selanjutnya, termasuk pedoman untuk penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja utama (IKU) sebesar 99,92%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja utama tersebut sebagai berikut :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani dari rencana 100% terealisasi 99,92%

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024 menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 99,92%, termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 58.557.065.236,00,-, dari total rencana anggaran sebesar Rp. 54.655.184.715,00-.

Capaian kinerja dinas apabila dibandingkan RENJA dengan RENSTRA dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

URUSAN / UNSUR

BIDANG URUSAN

PERANGKAT DAERAH

: WAJIB

: SOSIAL

: DINAS SOSIAL

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	01	01			Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100						
1106	110601	01	01	0001		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Bulan	12						
1106	110601	01	01	0002		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan surat kabar, peraturan perundang-undangan koran- Radar Bogor-Media lainnya peraturan perundang- undangan	Media	4						
1106	110601	01	01	0003		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Logistik	4						
1106	110601	01	01	0004		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya jamuan makanan dan minuman	Porsi	2470						
1106	110601	01	01	0050		Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Dokumen/ Bulan	48						
1106	110601	01	01	0051		Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat	Terlaksananya pengelolaan dokumentasi dan arsip perangkat daerah	Bulan	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Daerah									
1106	110601	01	01	005 2		Pengelolaan Keamanan Kantor	Terlaksananya kegiatan pengelolaan keamanan kantor	Petugas Keamanan/ Bulan	13 12						
1106	110601	01	01	005 3		Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga jasa pelayanan kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih	Orang (7 Dinas, 3 BKS) Jenis Bulan	10 5 12						
1106	110601	01	01	005 4		Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/operasional Jumlah Penggantian STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Unit Kendaraan Dinas	21						
1106	110601	01	01	015 3		Pembangunan Penunjang Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan Lahan Parkir dan Pembuatan Taman	Fasilitas	4						
1106	110601	01	01	020 3		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan Peralatan KantorTempat TidurSound systemMeja KomputerMeja KerjaMeja RapatKursi Tunggupapan Visual ElektronikKameraWirelessMesin AbsensiSofa AC	Jenis	1						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	01	01	020 4		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Filling Kabinet Rak Arsip Televisi Gordein CCTV Kulkas Karpas Lemari Arsip Dispenser	Jenis	1						
1106	110601	01	01	020 5		Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan Peralatan Kantor Komputer Printer Mesin Fax Penghancur Kertas Proyektor Layar Proyektor Scanner Stabilizer	Jenis	5						
1106	110601	01	01	020 6		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor Cetakan Penggandaan Spanduk	Jenis Perleng kapan	14						
1106	110601	01	01	020 7		Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Terlaksananya Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jenis	4						
1106	110601	01	01	035 1		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Kerja Peruntukan Gedung Kantor	Gedung	2						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	01	01	035 3		Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Halaman Parkir dan Taman	Gedung	1						
1106	110601	01	01	035 4		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/ operasional - Kendaraan Roda 2- Kendaraan Roda 4	Unit Kendaraan Dinas	21						
1106	110601	01	01	035 5		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Jenis	1						
1106	110601	01	01	035 6		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Jenis	2						
1106	110601	01	01	035 7		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Terpeliharanya Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jaringan	1						
1106	110601	01	01	045 0		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Bulan	12						
1106	110601	01	01	100 0		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran	Terlaksananya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Bulan	12						
1106	110601	01	01	100 1		Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Terlaksananya pembinaan mental dan rohani aparatur Dinas Sosial	Bulan	12						
1106	110601	01	01	100 3		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bulan	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	01	01	100 4		Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Orang	50						
1106	110601	01	01	200 1		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran - Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dokume n	3						
1106	110601	01	01	200 2		Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Bulan	12						
1106	110601	01	01	200 3		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokume n	3						
1106	110601	01	01	200 4		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran	Dokume n	5						
1106	110601	01	01	200 5		Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	5						
1106	110601	01	01	200 7		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dokume n	5						
1106	110601	01	01	200 8		Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	1						
1106	110601	02	21			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH									
							1. Persentase keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan	%	0						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	2. Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten								
							a. Pada saat tanggap darurat bencana kabupaten	%	100						
							b. Setelah tanggap darurat bencana kabupaten	%	100						
							3. Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial	%	100						
1106	110601	02	21	000 1		Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Masyarakat Miskin melalui Pola Kemitraan	Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Miskin	Orang	240						
1106	110601	02	21	000 2		Verifikasi dan Validasi Data BDT bagi Masyarakat Miskin	Terlaksananya Pemutakhiran Data Masyarakat yang Masuk BDT - Terlaksananya Rakor Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Masyarakat Miskin - Terlaksananya Pendampingan Pelaksanaan BPNT	Data	341869						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	02	21	000 3		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	- Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan : - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Santunan uang - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi - Layanan Dukungan Psikososial (LDP)	Orang	800						
1106	110601	02	21	000 4		Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Bencana	- Terlaksananya Bimbingan Teknis SDM TAGANA - Terselenggaranya Bimbingan Teknis penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) - Terlaksananya sosialisasi Sekolah Siaga bencana	Orang/ Kecamat an	45						
1106	110601	02	21	000 5		Pendampingan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)	-Terfasilitasinya Pendamping PKH dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) -Tersalurkannya beasiswa untuk mahasiswa miskin	Kecamat an	40						
1106	110601	02	21	000 6		Pendampingan/Bantua n Hukum kepada Masyarakat Miskin	Terlaksananya Pendampingan bagi Masyarakat Miskin yang Terkena Kasus Hukum	Orang/K asus	6						
1106	110601	02	21	000 7		Jaminan Sosial dan Pemulangan kepada Orang Terlantar di Perjalanan (OTDP)	-Terfasilitasinya Kebutuhan OTDP	Orang	20						
1106	110601	02	21	100 0		Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) (DAK)			0						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	03	22			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma	4. Presentase	%	100						
							a. Penyandang disabilitas terlantar		407 Orang (5,53%)						
							b. Anak terlantar		135 Orang (1,81%)						
							c. Lanjut usia terlantar		260 Orang (0,94%)						
							d. Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		100 Orang (15,60%)						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	03	22	000 1		Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	- Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis - Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS) - Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Eks Warga Binaan - Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Kaum Minoritas - Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Orang dengan Eks HIV/AIDS (Eks ODHA) - Terselenggaranya Pencegahan Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Korban NAPZA - Terlaksananya Penjangkauan PMKS Anak Jalanan - Terlaksananya Pemulangan PMKS ke Daerah Asal/Panti Rehabilitasi	Orang	300						
1106	110601	03	22	000 2		Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang	- Terlaksanya Rehabilitasi Sosial bagi korban Tindak Kekerasan - Terlaksanya Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Orang	Orang	40						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	03	22	0003		Pendampingan dan Bimbingan Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Masalah Sosial	-Terlaksananya Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum - 'Terlaksananya Pembinaan Anak Jalanan - 'Terlaksananya Pengiriman Anak Terlantar ke Panti-Panti Sosial - 'Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Penyandang Masalah Sosial	Orang	135						
1106	110601	03	22	0004		Pengembangan Kapasitas Lanjut Usia	- Terlaksananya Gerakan Nyaah Ka Kolot bagi Masyarakat- Terlaksananya Pelatihan UEP Lansia Produktif- Terlaksananya Pengiriman Lansia Terlantar ke Panti-Panti Sosial- Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lansia	Orang	260						
1106	110601	03	22	0005		Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	- Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Anak dan Keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus - Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus - Terlaksananya Pemenuhan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Bagi Peserta Didik Inklusif	Orang/A BK	304						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	03	22	000 6		Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Kabupaten Bogor	- Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas - Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat - Terlaksananya Penyelenggaraan Alat Bantu Kepada Penyandang Disabilitas - Terlaksananya Penyaluran Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas	Orang	407						
1106	110601	04	23			Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat	5. Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS	%	652 (6,33%)						
1106	110601	04	23	000 1		Peningkatan Peran Keluarga dan Masyarakat Terhadap PMKS	- Terselenggaranya Penyuluhan dan Advokasi Penanganan PMKS bagi Masyarakat (Keluarga yang memiliki Kategori Anak Usia SMP dan SMA serta Anak Usia SMP dan SMA) - Terselenggaranya Pelayanan di LK3	Orang	200						
1106	110601	04	23	000 2		Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan UEP Bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)	Terlaksanannya Bimsos dan Pelatihan Keterampilan UEP Bagi WRSE	Orang/W RSE	60						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	04	23	000 3		Pelayanan TSKS Kabupaten Bogor	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas TSKS dan PSM	Orang Tenaga Kesejaht eraan Sosial Kecamat an (TKSK) PSM	40 70						
1106	110601	04	23	000 4		Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bogor	Terselenggaranya Pelayanan SLRT dalam Rangka Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan :- Terlaksananya Bintek Bagi Pelaksana SLRT dan Puskesmas.- Terlaksananya Rakor Pelaksana SLRT dan Puskesmas- Terfasilitasi Petugas Pelaksana SLRT-Terlaksananya Pembentukan Puskesmas di Desa dan Kelurahan	Petugas SLRT	490						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	04	23	000 5		Peningkatan Kapasitas PSKS di Kabupaten Bogor	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas PSKS di Kabupaten Bogor: - Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Pelatihan UEP Karang Taruna - Terlaksananya Bimbingan Sosial Managemen dan UEP LKS - Terlaksananya Penyaluran Kebutuhan Dasar Anak. - Terlaksananya Penyaluran Kebutuhan Operasional LKS	PSKS	223						
1106	110601	04	23	000 6		Bimbingan Penyuluhan Sumbangan Sosial dan Undian Berhadiah	Terlaksananya Bimbingan Penyuluhan Sumbangan Sosial dan Undian Berhadiah bagi Masyarakat	PSKS/ Perusahaan	60						
1106	110601	04	23	000 7		Penanaman Nilai-Nilai Kesetia Kawanannya Sosial bagi Tokoh Masyarakat	- Terlaksananya Penanaman Nilai-Nilai Kesetia Kawanannya Sosial Masyarakat - Terselenggaranya HKSN	Orang/ Pengusaha	1035						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	04	23	000 8		Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor	- Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kerintisan bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor (Anak Sekolah) -Terlaksananya Asistensi Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan - Terselenggaranya Hari Pahlawan Tingkat Kabupaten - Terlaksananya Pelestarian Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Bogor - Perusahaan yang mengikuti kegiatan peningkatan kepedulian sosial pengusaha melalui CSR	KK dan TMP	5						
1106	110601	04	23	100 0		Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK)		-	0						
1106	110601	01	24			PROGRAM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA PMKS DI BKS	Terpenuhinya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di BKS	%	100						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1106	110601	01	24	000 1		Penyelenggaraan Ketatausahaan UPT	- Terlaksananya Operasional BKS oleh Pelaksana - Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Klien Penerima Manfaat Shelter - Terlaksananya Pengiriman/Rujukan Penerima Manfaat ke Lokasi Rujukan (sesuai kebutuhan) - Terlaksananya Penanganan Jenazah Klien	Bulan Operasio nal Orang Orang	12 60 15 5						
1106	110601	01	24	000 2		Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan PMKS	- Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS (Masyarakat Rawan Miskin, Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, WTS) - Terlaksananya Perlindungan Sosial PMKS	Orang Peserta Pelatiha n	90						
01	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%		99,62	100				
01	06	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Pedoman Kinerja Perangkat Daerah	Dokume n		24	24				
01	06	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja PD yang tersusun,Forum PD yang dilaksanakan.	Dokume n		4	4				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Dokume n		1	1				
01	06	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	Dokume n		1	1				
01	06	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan Jankin yang disusun	Dokume n		2	2				
01	06	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P dan Jankin Perubahan yang disusun	Dokume n		2	2				
01	06	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen hasil evaluasi program/kegiatan (LAKIP, LKPJ, LPPD, PMPRB, RANHAM, Data Statistik, Evkin, SPM, Publikasi kinerja, WEB)	Dokume n		10	6				
01	06	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil evaluasi kinerja (Evaluasi internal PD, Manajemmen resiko, Monev, SKM)	Dokume n		4	7				
			2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokume n		72	33				
01	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dokume n		46	46				
01	06	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Verivikasi Keuangan SKPD	Dokume n		12	12				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen		12	12				
01	06	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen		12	1				
01	06	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen		15					
01	06	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Dokumen		18	18				
01	06	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		8	2				
01	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Layanan		11	11				
01	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis		6	1				
01	06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis		4	20				
01	06	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Jenis		11	13				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran, tabung gas, BBM dan Air Minum	Jenis		4	4				
01	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis		8	8				
01	06	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Surat Kabar	Media		4	4				
01	06	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/ Material yang dibeli	Jenis		2	3				
01	06	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan Jamuan Tamu	Porsi		625	1500				
01	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dibutuhkan	Perjalanan		324	428				
01	06	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Arsiparis Dinas	Bulan		12	12				
01	06	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik	Bulan		12	12				
01	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan		2	1				
01	06	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit		1					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit							
01	06	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Singgah yang di Bangun	Unit		1					
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung serta Pos Satpam	Unit							
01	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa		3	3				
01	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis Jasa Surat Menyurat	Jenis		3	3				
01	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan setiap bulan	Rekening		4	4				
01	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
01	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	Jasa		4	4				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						UPT BALAI KESEJAHTERAAN SOSIAL									
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN									
01	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
01	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PMKS di BKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		50	50				
01	06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemelih araan		6	6				
01	06	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/Jabatan yang terpelihara	Unit		16	7				
01	06	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	Unit		5	12				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	01	2	09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
01	06	01	2	09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
01	06	01	2	09		Pemeliharaan Mebel									
01	06	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis		4	5				
01	06	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC	Unit/ Kali		17	30				
01	06	01	2	09		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
01	06	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis		4	4				
01	06	01	2	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Sarana							
01	06	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Kantor	Sarana		1	1				
01	06	01	2	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal :Kursus dan Sosialisasi								

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS	%		100	100				
01	06	02	2	02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan pemberian Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) serta Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Kegiata n		1	1				
01	06	02	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Jumlah kecamatan yang terkoordinasi PUB dan UGB	Kec		35	30				
							- Jumlah lembaga/perkumpulan/yayasa n dan perusahaan yang diberikan rekomendasi PUB dan UGB	Kec		35	30				
01	06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kegiata n		5	5				
01	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (PSM)	Jumlah PSM yang mendapatkan Bimtek	PSM		50	25				
01	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi	Jumlah TSKS yang mendapatkan Bimtek	Orang		40	40				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota(TKSK)	Jumlah TKSK yang mendapatkan tali asih	Orang		40	40				
01	06	02	2	03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (WRSE)	Jumlah Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) yang mengikuti pelatihan Tata Rias	Orang		25	25				
							Jumlah WRSE yang mendapatkan pelatihan keterampilan UEP tata Rias	Orang		30	25				
01	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (SLRT,Karang Taruna,Tagana) (**)	- Jumlah Peserta Petugas SLRT, Karang Taruna, Tagana yang mengikuti Bimtek	PSKS		837	698				
							Jumlah Fasilitator yang Terbentuk	Fasilitator		260	112				
							Jumlah Front Office dan Back Office	Orang		6	6				
							Jumlah LKS yang menerima bantuan sosial	LKS		29	31				
							Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek dan UEP LKS	LKS		95	135				
							Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan TAGAN	Orang		60	80				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Peserta yang mengikuti UKS Karang Taruna	Karang Taruna		80					
							Jumlah PSKS yang Menerima Hibah	PSKS		5	160				
							Jumlah Puskesmas tambahan yang dibentuk	Puskesmas		50	7				
							Jumlah Puskesmas yang Terbentuk	Puskesmas		212	112				
01	06	02	2	03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Peserta goes to PAUD	Orang Kasus		60					
							Jumlah Kasus yang di tangani LK3			62	50				
01	06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran yang di tangani	%		100	100				
01	06	03	2	01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Migran	Orang		8	10				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	03	2	01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Migran yang diberikan Fasilitas dalam Proses Pemulangan ke Daerah Asal	Orang		8	10				
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%		100	100				
01	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (*)	Terlaksananya pengembalian fungsi sosial dasar bagi PMKS diluar panti	Bulan		12	12				
01	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah permakanan yang diberikan kepada PMKS diluar Panti	Anak/La nsia Terlantar		200	275				
01	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang diberikan kepada PMKS diluar Panti	Anak/La nsia Terlantar		200	260				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang tersedia untuk PMKS diluar panti	Anak/La nsia Terlantar		50	65				
01	06	04	2	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemulangan PMKS ke Daerah Asal/Panti Rehabilitasi	Anak/La nsia Terlantar		40	40				
01	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan fisik,mental,spiritual	Anak/La nsia Terlantar		80	120				
01	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga anak terlantar dan lansia terlantar yang mengikuti bimbingan sosial	Pendamp ing		80	80				
01	06	04	2	01		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak									
01	06	04	2	01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pelayanan Data dan Pengaduan	Bulan		12	12				
01	06	04	2	01		Pemberian Layanan Kedaruratan									

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial (*)	Terlaksananya pengembalian fungsi sosial PMKS diluar Korban HIV dan Napza diluar panti	Bulan		12	12				
01	06	04	2	02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pelayanan Data dan Pengaduan	Bulan		12	12				
01	06	04	2	02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan oleh tim TRC	Bulan		12	12				
01	06	04	2	02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah permakanan yang diberikan kepada PMKS diluar HIV/Aids dan Napza	Orang		164	100				
01	06	04	2	02		Penyediaan Sandang									
01	06	04	2	02		Penyediaan Alat Bantu									
01	06	04	2	02		Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti									
01	06	04	2	02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang		100	40				
01	06	04	2	02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah keluarga gelandangan dan pengemis yang mengikuti bimbingan sosial	Orang		85	40				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	04	2	02		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak									
01	06	04	2	02		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
01	06	04	2	02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pendampingan Kasus PMKS oleh Peksos	Bulan		12	12				
01	06	04	2	02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemulangan PMKS ke Daerah Asal/Panti Rehabilitasi	200		200	200				
01	06	04	2	02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang diberi rujukan	200		200	100				
01	06	04	2	02		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota									
01	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang tertangani	%		100	100				
01	06	05	2	01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar dengan baik								
01	06	05	2	01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di jangkau dan di fasiliitasi melalui panti	Orang		40	50				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	05	2	01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mendapat rujukan ke panti	Orang		40	50				
							jumlah orang terlantar di perjalanan yang diberikan bantuan			100	100				
01	06	05	2	01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di terfasilitasi melalui panti dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		40	50				
01	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolaanya Data Fakir Miskin di Kabupaten Bogor	Data		341856	341856				
01	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya potensi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang valid dan akurat	Kec		40	40				
							Jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi	Orang		435	435				
01	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	PPKH mampu mengidentifikasi pelaksanaan penyaluran bantuan non tunai (RAKORDA)	Orang		400	164				
							Jumlah Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	Orang		60	40				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	05	2	02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KPM PKH yang mendapatkan Bantuan KUBE PKH	Kelompok		10	15				
							Sosialisasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bogor	Orang		435	130				
							Jumlah Mahasiswa KPM PKH yang mendapatkan bantuan pendidikan	Orang		20	9				
							Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Bantuan Pendampingan Hukum	Kasus		9	10				
01	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%		100	100				
01	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan berupa Bantuan Kedaruratan dan Kebutuhan Dasar	Orang		600	600				
01	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah permakanan yang tersedia untuk korban bencana alam dan sosial	Paket		600	4000				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	06	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang tersedia untuk korban bencana alam dan sosial	Paket		250	600				
01	06	06	2	01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan yang tersedia untuk pengungsi	Lok		6	8				
01	06	06	2	01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pengiriman Anggota TAGANA ke Lokasi Bencana	Kali		16	16				
01	06	06	2	01		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan Korban Bencana yang membutuhkan penanganan khusus (depresi)	Orang			50				
01	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kesiapsiagaan masyarakat dan TAGANA terhadap penanganan bencana	Kecamatan		40	40				
01	06	06	2	02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Orang		200	250				
01	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terkoordinasinya Pelaksanaan Tugas TAGANA dalam Penanganan Bencana	Kecamatan		40	40				
01	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Berkondisi Baik	%		100	100				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharannya Taman Makam Pahlawan	TMP		6	7				
01	06	07	2	01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	JumlahTaman Makam Pahlawan yang di Rehabilitasi	TMP		6	7				
01	06	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	TMP		6	7				
							Pengelolaan dan Perawatan terhadap Taman Makam Pahlawan (TMP)								
							penyelenggaraan hari pahlawan				2				
01	06	07	2	01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Pengamanan TMP	Orang		6	7				
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Persentase dukungan pelayanan kesekretariatan	%				100	100	100	100
1	06	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok				24	24	24	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	01	2	01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok				4	12	12	100
1	06	01	2	01	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dok				1	12	12	100
1	06	01	2	01	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dok				1	1	1	100
1	06	01	2	01	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dok				2	2	2	100
1	06	01	2	01	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dok				2	2	2	100
1	06	01	2	01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok				10	10	10	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	01	2	01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Lap				4	4	4	100
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Org/ Bln				70	43	43	100
1	06	01	2	02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bln				41	43	43	100
1	06	01	2	02	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok				12	12	12	100
1	06	01	2	02	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok				12	12	12	100
1	06	01	2	02	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap				20	20	20	100
1	06	01	2	02	000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-							
1	06	01	2	02	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap				18	18	18	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	01	2	02	000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok					18	18	100
1	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Pkt				11	11	11	100
1	06	01	2	06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt				6	1	1	100
1	06	01	2	06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pkt				4	11	11	100
1	06	01	2	06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pkt				11	2	2	100
1	06	01	2	06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt				4	1	1	100
1	06	01	2	06	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt				8	1	1	100
1	06	01	2	06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok				4	1	1	100
1	06	01	2	06	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pkt				2	1	1	100
1	06	01	2	06	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap				625	1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	01	2	06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap				324	224	224	100
1	06	01	2	06	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok				12	1	1	100
1	06	01	2	06	001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
1	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Unit				3	8	8	100
1	06	01	2	07	000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit							
1	06	01	2	07	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				3	8	8	100
1	06	01	2	07	000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							
1	06	01	2	07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	01	2	07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap				3	4	4	100
1	06	01	2	08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap				3	1	1	100
1	06	01	2	08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap				6	1	1	100
1	06	01	2	08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap				4	2	2	100
						UPT BALAI KESEJAHTERAAN SOSIAL									
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%							
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PMKS di BKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Lap				100	100	100	100
1	06	01	2	08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap				100	100	100	100
1	06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit				18	15	15	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	01	2	09	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit				16	8	8	100
1	06	01	2	09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				5	2	2	100
1	06	01	2	09	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				4	1	1	100
1	06	01	2	09	000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit				17	1	1	100
1	06	01	2	09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				4	1	1	100
1	06	01	2	09	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1	1	1	100
1	06	01	2	09	001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1	1	1	100
1	06	01	2	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-							

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS terlatih	%				100	100	100	100
1	06	02	2	02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) serta Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Dok				1	1	1	100
1	06	02	2	02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dok				1	1	1	100
1	06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kegiatan				100	5	5	100
1	06	02	2	03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				310	90	90	100
1	06	02	2	03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				40	40	40	100
1	06	02	2	03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Klg				25	25	25	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Kabupaten/Kota									
1	06	02	2	03	000 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lmbg				170	96	96	100
1	06	02	2	03	000 5	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sfkt				50	30	30	100
1	06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Akumulasi penanganan warga migran korban tindak kekerasan	Org				10	10	10	100
1	06	03	2	01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Migran	Org				10	10	10	100
1	06	03	2	01	000 3	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				10	10	10	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS di luar panti yang tertangani kebutuhan dasarnya	%				100	100	100	100
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (*)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Orang				12	15026	14975	99,66
1	06	04	2	01	000 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				590	1500	1500	100
1	06	04	2	01	000 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				360	1600	1600	100
1	06	04	2	01	000 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				294	2513	2462	97,97
1	06	04	2	01	000 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				40	77	77	100
1	06	04	2	01	000 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				140	190	190	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	04	2	01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				450	260	260	100
1	06	04	2	01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				40	35	35	100
1	06	04	2	01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				40	65	65	100
1	06	04	2	01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				5920	8640	8640	100
1	06	04	2	01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				40	55	55	100
1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				40	91	91	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial (*)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial (*)	Orang				12	640	640	100
1	06	04	2	02	000 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				48	40	40	100
1	06	04	2	02	000 2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				150	100	100	100
1	06	04	2	02	000 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				90	30	30	100
1	06	04	2	02	000 4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Org					30	30	100
1	06	04	2	02	000 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org							

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	04	2	02	000 6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Org							
1	06	04	2	02	000 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				100	40	40	100
1	06	04	2	02	000 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				30	40	40	100
1	06	04	2	02	000 9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				30	50	50	100
1	06	04	2	02	001 0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				30	70	70	100
1	06	04	2	02	001 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				20	80	80	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	04	2	02	001 2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				60	80	80	100
1	06	04	2	02	001 3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				40	80	80	100
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang tertangani	%				100	100	100	100
1	06	05	2	01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang dipelihara	Bulan				12	180	180	100
1	06	05	2	01	000 1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				50	10	10	100
1	06	05	2	01	000 2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				10	110	110	100
1	06	05	2	01	000 3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				60	60	60	100
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin di Kabupaten Bogor yang dikelola	Org				1025407	24360	24360	100
1	06	05	2	02	000 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Org				1500	24000	24000	100
1	06	05	2	02	000 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Klg				435	355	355	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	05	2	02	000 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				110	5	5	100
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%				97	100	100	100
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan berupa Bantuan Kedaruratan dan Kebutuhan Dasar	Org/Unit				1282	4425	4420	99,89
1	06	06	2	01	000 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				1000	4000	4000	100
1	06	06	2	01	000 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				250	250	250	100
1	06	06	2	01	000 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit				1	5		
1	06	06	2	01	000 4	Penanganan Khusus bagi KelompoK Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				7	10	10	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	06	2	01	000 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				24	160	160	100
1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah KSB dan TAGANA terhadap penanganan bencana	Org/Kp				40	100	100	100
1	06	06	2	02	000 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kp				7	8	8	100
1	06	06	2	02	000 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Org				40	120	120	100
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Berkondisi Baik	%				100	100	100	100
1	06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Mkm				7	13	13	100
1	06	07	2	01	000 1	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dok				3	1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1	06	07	2	01	000 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Mkm				6	6	6	100
1	06	07	2	01	000 3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lap				6	6	6	100

rencana yang telah ditetapkan namun secara anggaran tidak dapat terealisasi semuanya karena disesuaikan dengan kebutuhan dinas.

C. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2024

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2024

3. Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2024

4. Program Pemberdayaan PSKS dan kepedulian Sosial Masyarakat

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2024

5. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS di BKS

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2024.

A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :

I. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yaitu :

1. Adanya beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran.

II. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu :

1. Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas; dan
2. Penganggaran kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Dinas.
3. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mengakomodir seluruh target yang ditetapkan.

III. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :

1. Program/kegiatan tidak ada yang melebihi target.

IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas, yaitu :

1. Apabila target kinerja dalam Renstra tidak tercapai akan mengakibatkan rendahnya realisasi kinerja dinas sesuai program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.
2. Apabila target kinerja dalam renstra tercapai mengakibatkan baiknya realisasi kinerja dinas sesuai program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.
3. Apabila target kinerja dalam renstra melebihi mengakibatkan sangat tingginya realisasi kinerja dinas sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

V. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:

1. Pada tahun berikutnya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perlu ditingkatkan dan mengusulkan anggaran pembantuan dari APBN dan APBD I.
2. Mengakomodir usulan-usulan yang bersumber dari Musrenbang Kecamatan, Forum PD, Musrenbang Kabupaten dan juga hasil Reses DPRD agar kegiatan yang direncanakan lebih tepat sasaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Tata cara penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Jenis indikator yang dikaji adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, indikator kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam IKU adalah sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
2. Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan PPKS;
3. Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi.

Pada tahun 2024 ketercapaian IKU Dinas Sosial sebesar 99,86 % dimana Taraf Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terealisasi sebanyak 19.295 Orang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2024

URUSAN : WAJIB
BIDANG URUSAN : SOSIAL
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
1	Persentase PPKS yang ditangani		0,80						
2	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PSKS		6,33						
	TUJUAN								
1	Persentase PPKS yang ditangani	%		100 (108.981Orang)	97,33	97,33			
	SASARAN								
1	Persentase PSKS yang Berkualitas	%		100 (1.303 Orang)	99,16	100			
2	Persentase layanan SLRT dan puskesmas desa	%		100 (70 Orang)	99,19	100			
3	Persentase masyarakat miskin yang tertangani	%		100 (1.124 Orang)	90,87	100			

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapat penanganan PPKS	%		100 (254 Orang)	99,05	100			
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan PPKS	%		100 (106.230 Orang)	96,08	97,34			
	TUJUAN								
	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%					100(20.276 Orang)	99,86(19.295 Orang)	99,86
	SASARAN								
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapat penanganan PPKS	%					100 (15.026 Orang)	99,83 (14.975 Orang)	99,83
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan PPKS	%					100 (5.250 Orang)	99,89 (4.320 Orang)	99,89

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

a. Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas dan Hal Kritis yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas

Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi bisa memperbaiki iklim ekonomi yang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan. Kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang sering disoroti masyarakat menjadi faktor penentu yang penting dari penurunan minat investasi. Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.

Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektronika. Di sisi lain masyarakat belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas.

Indikator SPM bertujuan untuk :

1. Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar khususnya di bidang Sosial;

2. Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan dan sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Beberapa pelayanan yang harus dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, yaitu :

1. Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan pasca bencana alam skala kabupaten/kota;
2. Anak Terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya diluar panti skala kabupaten /kota;
3. Lanjut Usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti skala kabupaten/kota;
4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya skala kabupaten/kota;
5. Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya skala kabupaten/kota; dan

Pada akhirnya, dengan adanya SPM bidang sosial dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Artinya, SPM itu juga merupakan ukuran untuk melihat kinerja dinas.

b. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas

Pada dasarnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan implementasi dari Tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor melalui capaian Visi dan

Misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial saja tetapi perlu dukungan PD lain.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Faktor pengaruh sekaligus permasalahan tersebut, adalah :

1) Keterbatasan SDM;

Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada di dinas dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan pengalaman. Secara kuantitas juga, masih kurang memadai sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.

2) Alokasi anggaran;

Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah diusulkan. Optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran yang terbatas. Akibatnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indikator kinerja yang diharapkan.

3) Sarana dan prasarana.

Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan juga tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung. Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat

terjadi karena dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi pada akhirnya dapat tidak tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Kekurangan perlengkapan kantor seperti sarana mobilitas.

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Provinsi dan Nasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi acuan bagi setiap dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target terukur serta penyediaan sumber pembiayaannya.

Selanjutnya, pelaksanaan Renja harus sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang merupakan kebijakan pembangunan daerah. Dengan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah maka secara otomatis capaian program Provinsi dan Nasional akan tercapai dikarenakan RPJMD Kabupaten Bogor mengacu kepada RPJMD Provinsi dan Nasional, sehingga dengan tercapainya pembangunan dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat di daerah secara khusus dan nasional secara umum.

d. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas

Tantangan dalam peningkatan pelayanan dinas adalah masih tingginya jumlah PPKS, sedangkan peluang dalam peningkatan pelayanan dinas diantaranya adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti-panti milik masyarakat.

e. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Dinas Sosial dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya sering kali menghadapi beberapa isu dan permasalahan

yang dapat mengurangi optimalisasi dalam melaksanakan tugas fungsi.

Beberapa permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial antara lain :

- 1) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang makin kompleks.
- 2) Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan
- 3) Belum dimilikinya keterampilan usaha oleh PPKS untuk dijadikan mata pencaharian yang andal.
- 4) Belum dimilikinya kesadaran berusaha secara berkelompok oleh PPKS.
- 5) Belum optimalnya pemantauan pendamping dan stakeholder terkait PKH.
- 6) Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (UHC)
- 7) Penanganan Bencana yang Responsif dan Tanggap
- 8) Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Dinas Sosial merencanakan untuk mengadakan program dan kegiatan guna menjawab atau memberikan solusi yang diantaranya adalah :

1. Meningkatkan program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),
2. Meningkatkan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
3. Meningkatkan program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Dengan lebih ditekankan terhadap kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi keluarga miskin, mengoptimisasikan Program Keluarga Harapan, rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan UEP, pelatihan KUBE bagi keluarga miskin.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan tabel 2.4, perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, terdapat beberapa sub kegiatan yang ditambah, hal tersebut dilakukan sesuai kebutuhan Dinas Sosial dengan tetap mempertimbangkan target yang perlu dicapai berdasarkan rencana kerja 2026 sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga perubahan-perubahan tersebut tetap dengan target capaian indikator baik program, kegiatan maupun sub kegiatan yang ada sebelumnya.

Adapun beberapa catatan mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan yang tetap digunakan namun menyesuaikan dengan menganalisis kebutuhan sebenarnya, terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan terkait nilai anggaran, mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk dapat mencapai target kinerja, selain itu adanya proses pengajuan usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang memerlukan adanya sub kegiatan baru yang harus di tanam pada SIPD untuk dapat mengalokasikan dana sebagaimana dimaksud.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Bogor

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen	1	Dokumen	
			RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2	Dokumen	
			RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	2	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	10	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Lap	4	

	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Org/ Bln	Org/ Bln	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bln	Org/ Bln	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	Dok	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	Lap	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	Lap	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	Dok	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum	Pkt	11	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt	1	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pkt	2	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pkt	2	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt	1	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt	1	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	1	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pkt	1	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	1	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	324	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	1	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Unit	62	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lap	3	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	1	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	1	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	8	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS terlatih	%	100	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) serta Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Dok	1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dok	1	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Dok	100	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Klg	120	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	150	
	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan		Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Org	0	

	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Org	6	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sfkt	30	
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Lembaga	0	

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Org	200	
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Org	850	
	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial		Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Lap	0	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Org	0	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Akumulasi penanganan warga migran korban tindak kekerasan	Org	10	

	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal		Jumlah Pemulangan Warga Migran	Org	10	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	0	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS di luar panti yang tertangani kebutuhan dasarnya	%	100	

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (*)		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Org	101339	
	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	2000	
	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	600	
	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	273	

	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	27	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	60	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	60	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	31	

	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	1728	
	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	10	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	17	
	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	27	

	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	5	
	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis		Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Org	5	
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)		Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	50	

	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	5	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Org	5	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial (*)		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial (*)	Org	1541	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	100 Orang	

	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	20 Orang	
	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	100 Orang	
	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	100 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	40	

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	40	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	5	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	5	

	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	15	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	15	
	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	10	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok	0	

	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Org	50	
	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Aduan		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase masyarakat miskin yang tertangani	%	100	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-anak terlantar yang dipelihara	Org	250	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	0	

	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	40	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	10	
	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi		Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi		0	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir Miskin di Kabupaten Bogor yang dikelola	Org	341856	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Org	1500	

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Klg	355	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan		40	
	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah		180	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	100	

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan berupa Bantuan Kedaruratan dan Kebutuhan Dasar	Org/Unit	5426	
	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	4000	
	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	250	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	10	

	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	160	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		0	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah KSB dan TAGANA terhadap penanganan bencana	Org/Kp	240	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kp	8	

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	120	
	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda		Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Org	0	
	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam		Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Org	0	
	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana		Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	0	
	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana		Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	0	

	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga	0	
	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah		Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	0	
	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	0	
	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial		Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	0	

	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana		Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan yang Berkondisi Baik	%	100	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Mkm	6	
	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dok	1	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Mkm	3	

	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lap	6	
	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		0	
	UPT BALAI KESEJAHTERAAN SOSIAL					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	2	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah PMKS di BKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Lap	2	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	2	

➤ Target SPM Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selengkapnya Target SPM Bidang Sosial pada Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			8.85 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					5.81 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	3.07 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	2688	103	2585	3.83 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	2.75 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					13.73 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	864	110	754.00	12.73 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	0	10.00	0.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	2000	0	2,000.00	0.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	300	0	300.00	0.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	273	43	230.00	15.75 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	0	5.00	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	40	40	0.00	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40	20	20.00	50.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	0	5.00	0.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	0	5.00	0.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	0	10.00	0.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	0	10.00	0.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	0	10.00	0.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					7.13 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	2.46 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	1396	43	1353	3.08 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	4.66 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					23.32 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	864	71	793.00	8.22 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	0	5.00	0.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1000	0	1,000.00	0.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	300	0	300.00	0.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	1	0	1.00	0.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	30	0	30.00	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10	0	10.00	0.00 %	
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	15	7	8.00	46.67 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	16	16	0.00	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	3	7.00	30.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20	15	5.00	75.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	10	2	8.00	20.00 %	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					9.50 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	4.39 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	1713	94	1619	5.49 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	5.11 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					25.57 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	864	151	713.00	17.48 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	4	1.00	80.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1000	0	1,000.00	0.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	300	0	300.00	0.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	273	67	206.00	24.54 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	0	1.00	0.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	30	0	30.00	0.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter	Orang	50	0	50.00	0.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	15	5	10.00	33.33 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	15	5	10.00	33.33 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	7	4	3.00	57.14 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	7	4	3.00	57.14 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	17	5	12.00	29.41 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					12.27 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	10.32 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	155	20	135	12.90 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	1.94 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					9.72 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	100	0	100.00	0.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	20	0	20.00	0.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	100	0	100.00	0.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	100	0	100.00	0.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2	0	2.00	0.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	40	10	30.00	25.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	40	10	30.00	25.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	0	5.00	0.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan	Orang	5	0	5.00	0.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	kesehatan dasar						
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	15	0	15.00	0.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	10	5.00	66.67 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	10	0	10.00	0.00 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					9.54 %	
Ya Terjadi Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	9.04 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	4425	500	3925	11.30 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	0.50 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					2.50 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	4000	500	3,500.00	12.50 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	250	0	250.00	0.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	5	0	5.00	0.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	10	0	10.00	0.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	160	0	160.00	0.00 %	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan-pembahasan terkait perumusan kebutuhan perencanaan program dan kegiatan tahun 2026, dinas sosial mendapatkan beberapa usulan-usulan hibah, yaitu pada program Pemberdayaan Sosial kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial						
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Bogor	Persentase PSKS terlatih	100	%	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100	%	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	45	Lembaga	
						1.Taman Gracelil 2 Nurul Yakin Cigombong 3 Inshira 4 LKS Arsyada 5 RQV Indonesia 6 LKS Darussalam Caringin 7 Griya Medika Arrahim 8 Yayasan Griya Kafil Yatim 9 Komitmen Bersama 10 LKS Gema Penca Indonesia 11 INABA 12 LKS Al Falah Lulut 13 LKS An Nahl 14 Zaina Nurfirdaus 15 LKSA Nurul Islam 16 Bersama Kita Pulih 17 LKS Nurul Haq Al-Kamil 18 Jembatan Amal

						19 LKS Sahabat Aktivis Pendidikan Anak (Sapa Indonesia) 20Darussolihin 21 Yayasan Silih Asih 22 Pelangi Rahayu 23 An- Nizhamiyyah, 24 Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 25 Yayasan An- Naba 26 Jendela Ibu 27 Yayasan Sundus Siyah Kalijaga 28 Bukit Karmel 29 LKSA Tarbiyatul Yatama 30Doa Yatim 31 Yayasan Manbaul Hisan 32Rumah Autis Gunung Putri 33 Satu Benih 34 Yayasan Kesadaran Ummat Ridho Sosial Idaman Yatim Asnawiyah (Kursiya) 35 Ibnu Sina Al Zahrawi 36 LKSA Baitul Qurro 37 Sanggar Wicara 38 PSAA Al- Mukhlishin 39 Yataama 40 Penyandang Disabilitas 41 LKS Darma Adi Karya DPC Kabupaten Bogor 42 Anantari 43 LKS Senja Cibinong 44HWDI 45 Yayasan Nurul Mustofa Khairu Ummah
--	--	--	--	--	--	---

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Kabupaten Bogor, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor bersinergi dengan dokumen perencanaan lain baik nasional seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun ditingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jabar, RPJM Provinsi Jawa Barat, RKPD Provinsi Jabar yang dipadukan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025 – 2029 terutama keterpaduan dalam program kegiatan serta sasaran target yang akan dicapai.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
 - b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
 - d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia;
 - e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- dan

f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis; 30
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar; Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

c. Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. dan kerentanan sosial.

Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- d. Penanganan Fakir miskin yaitu semua upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Keterkaitan Program dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai dengan asta cita Dinas Sosial masuk pada misi ke-4 dan ke-6 yaitu:

- Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan dan penyandang disabilitas.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 adalah “Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar»

Kerangka pikir 4 prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yaitu mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan pedesaan, serta miskin dan kaya dengan sasaran meningkatnya ketahanan sosial masyarakat indicator kerja persentase penduduk miskin dan indeks kesejahteraan sosial. Program pembangunan daerah yang mendukung yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Pemberdayaan Sosial.

Visi Indonesia Emas 2025-2045 Berdaulat, Maju dan Berkedaulatan.

Faktor Internal :

1. Potensi Jawa Barat :
 - Penduduk
 - Kekayaan Alam
 - Sosial Budaya
2. Capaian Pembangunan Secara Umum diatas rata-rata nasional.

Faktor Eksternal :

Tantangan Global, Isu Lokal, Nasional dan Global.

Visi Jawa Barat 2025-2045 Mandiri, Maju dan Berkelanjutan 5 sasaran visi, 8 Misi Pembangunan, 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan.

5 Sasaran Visi 2025-2045 :

1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission.

Keterkaitan Misi dan 17 Arah Pembangunan

RPJPN 2025-2045 terdiri dari :

1. Transformasi Sosial

- Kesehatan untuk semua
- Pendidikan berkualitas yang merata
- Perlindungan Sosial yang Adaptif.

2. Transformasi Ekonomi

- Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
- Penerapan Ekonomi Hijau
- Transformasi Digital
- Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola

- Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

- Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial
- Stabilitas Ekonomi Makro
- Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- Lingkungan Hidup Berkualitas
- Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
- Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

RPJPD 2025-2045 terdiri dari :

1. Transformasi Sosial

- Pelayanan Kesehatan Prima untuk semua
- Pendidikan Berkualitas yang merata
- Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju

1. Transformasi Ekonomi

- Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah
- Penerapan Ekonomi Hijau, Biru dan Digital
- Pembangunan SDM berdaya saing
- Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestic dan global
- Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan.

2. Transformasi Tata Kelola

- Peningkatan Pemerintah yang Berintegritas, adaptif dan inovatif

3. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

- Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas
- Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- Peningkatan Kerjasama Regional maupun Internasional.

4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
- Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda dan Kesenjangan Gender
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- Peningkatan Ketahanan Pangan, Air dan Energi
- Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim.

45 Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025 – 2045

- Perlindungan Sosial yang Adaptif
 1. Tingkat Kemiskinan
 2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi
 3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal.

Tabel 3.3
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL		TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG		BIDANG/SEKSI/SUBID/UPT PENGAMPU	
1		2		3	
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		Dinas Sosial Kab. Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.				Bidang Rehabilitasi Sosial	
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				Bidang Pemberdayaan Sosial	
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dinas Sosial Kab. Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :			Bidang Penanganan Fakir Miskin
	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	a.	Perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.		
	Membangun dari desa				

	dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.				
	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	b.	Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.		
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	c.	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.		

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

1. Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Bogor sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 3) Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 6) Meningkatkan perubahan prolaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
- 7) Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

2. Sasaran

Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 3) Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 6) Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
- 7) Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Cara mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh terpadu sebagai upaya organisasi dalam menetapkan kebijakan dan program untuk memperoleh hasil yang dapat ditetapkan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Sesuai misi ke-5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Arah Kebijakan Dinas Sosial yaitu:

1. Penurunan Kemiskinan dengan strategi pada tahun 2026 yaitu penguatan dan pelaksanaan penurunan kemiskinan melalui skema graduasi dan;
2. Pemenuhan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dengan strategi pada tahun 2026 yaitu Pemenuhan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi kelompok rentan, terutama disabilitas, lansia.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Rencana Kerja Dinas Sosial 2026 terdiri dari 7 program, 16 kegiatan dan 106 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 42.582.706.708,- dan perkiraan maju anggaran tahun 2026 terdiri dari 7 Program, 16 kegiatan dan 106 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 51.882.673.726,-.

Anggaran Perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada Table 3.5 berikut ini :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2026

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Tujuan					
Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Cakupan Pelayanan PPKS yang mendapatkan Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi	Rata-rata Capaian PPKS yang mendapat bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi	22,96	%
Sasaran					
1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS yang menjadi kewenangan terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Gelandangan dan Pengemis, Fakir Miskin, Pekerja Migran, Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar dibagi populasi PPKS yang menjadi kewenangan x 100%	42,22	%
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga sasaran graduasi kemiskinan		Persentase jumlah sasaran keluarga graduasi miskin yang dapat melakukan usaha	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah mendapat bantuan usaha dibagi jumlah sasaran graduasi kemiskinan X 100%	3,69	%

Faktor-faktor yang mendukung dilaksanakannya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

a) Target/Indikator SDGs

1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 SDGs, yang dikenal sebagai "Tanpa Kemiskinan", bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk di seluruh dunia. Tujuan ini merupakan hal yang sangat penting dalam kerangka TPB. Kabupaten Bogor telah menetapkan empat target yang sejalan dengan target TPB untuk mencapai Tujuan 1 SDGs. Target-target tersebut meliputi: (1) mengurangi separuh jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan; (2) melaksanakan sistem dan program perlindungan sosial; (3) memastikan bahwa semua warga memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi; dan (4) membangun ketahanan masyarakat miskin.

Untuk mencapai Tujuan 1 SDGs, upaya dilakukan melalui arah kebijakan yang mencakup: (1) mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan dalam semua aspek kehidupan; (2) mencapai cakupan yang signifikan bagi kelompok miskin dan rentan; (3) menjamin hak yang sama bagi semua individu terhadap sumber daya yang ada dan akses ke layanan dasar; (4) membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan.

Dalam rangka mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk, dilakukan beberapa strategi sesuai dengan Tujuan 1 SDGs, yaitu: (1) mengurangi jumlah laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan sesuai definisi nasional, setidaknya separuhnya; (2) melaksanakan sistem dan program perlindungan sosial yang tepat bagi semua individu, termasuk kelompok yang paling miskin, serta mencapai cakupan yang signifikan bagi kelompok miskin dan rentan; (3) memastikan hak yang sama bagi semua individu, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, terhadap sumber daya ekonomi, akses ke layanan dasar, kepemilikan dan pengendalian tanah dan aset lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan layanan keuangan yang sesuai, termasuk layanan keuangan mikro; dan (4) membangun

ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap dampak ekstrem iklim serta guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Tabel Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan Pembangunan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun											
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline 2021)	Capaian SDGs	Target SDGs				
						2022	2022	2023	2024	2026	2026
	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	DINSOS	Jiwa	400	400	390.3	387.95	385.90	383.87	381.85

2. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan yang diterjemahkan secara umum sebagai upaya mengurangi kesenjangan intra dan antar negara yang merupakan Tujuan mendasar yang harus dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam rangka pencapaian Tujuan 10 SDGs yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, Kabupaten Bogor menetapkan 3 target, yang diselaraskan dengan target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target-target tersebut terdiri dari: (1) mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk; (2)

menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil; serta (3) mengadopsi kebijakan.

Upaya pencapaian Tujuan 10 SDGs, diarahkan diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif; serta (2) mengadopsi kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial.

Terkait dengan hal tersebut dalam upaya mengurangi kesenjangan intra dan antar negara yang esensinya tertuang dalam Tujuan 10 SDGs dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut: (1) mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional; (2) mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan; serta (3) mencapai kesetaraan yang lebih besar.

Tabel Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan Pembangunan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara											
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline 2021)	Capaian SDGs	Target SDGs				
						2022	2022	2023	2024	2026	2026
10.1	10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS/DINSOS	Persentase	8.13	6.85	8.13	7.57	7.95	7.70	7.87

Program Pendukung Sustainable Development Goals (SDG's)

NO	SDG's	Program
1	Menghapus Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
2	Menghapus Kelaparan	

3	Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan	
4	Pendidikan Bermutu	
5	Kesetaraan Gender	
6	Akses Air Bersih dan Sanitasi	
7	Energi Bersih dan Terjangkau	
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	
10	Mengurangi Ketimpangan	Program Pemberdayaan Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
11	Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan	
12	Konsumsi dan Produksi Yang bertanggung Jawab	
13	Penanganan Perubahan Iklim	
14	Menjaga Ekosistem Laut	
15	Menjaga Ekosistem Darat	
NO	SDG's	Program
16	Perdamaian; Keadilan dan Kelembagaan Yang Kuat	
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	

1) **Capaian SPM Dinas Sosial Tahun 2023**

Realisasi capaian SPM Bidang Sosial pada Tahun 2024
 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2623	2623	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	2400	2400	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	500	500	0	100.00 %	
	3.Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	400	400	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	1458	1458	0	100.00 %	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100.00 %	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	40	40	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	140	140	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	15	15	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)						
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	20	20	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	20	20	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	25	25	0	100.00 %	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	843	843	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	960	960	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	250	250	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	400	400	0	100.00 %	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	60	60	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	45	45	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	36	36	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1847	1847	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan						
	layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	960	960	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan						
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	250	250	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	400	400	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	1000	1000	0	100.00 %	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	90	90	0	100.00 %	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	45	45	0	100.00 %	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00 %	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)						
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	480	480	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	20	20	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	25	25	0	100.00 %	
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	400	400	0	100.00 %	
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	400	400	0	100.00 %	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100.00 %	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20	20	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	20	20	0	100.00 %	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	5	0	100.00 %	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	10	10	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	(layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)						
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4325	4325	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	3900	3900	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	250	250	0	100.00 %	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, velthebed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	5	5	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	160	160	0	100.00 %	

BAB IV

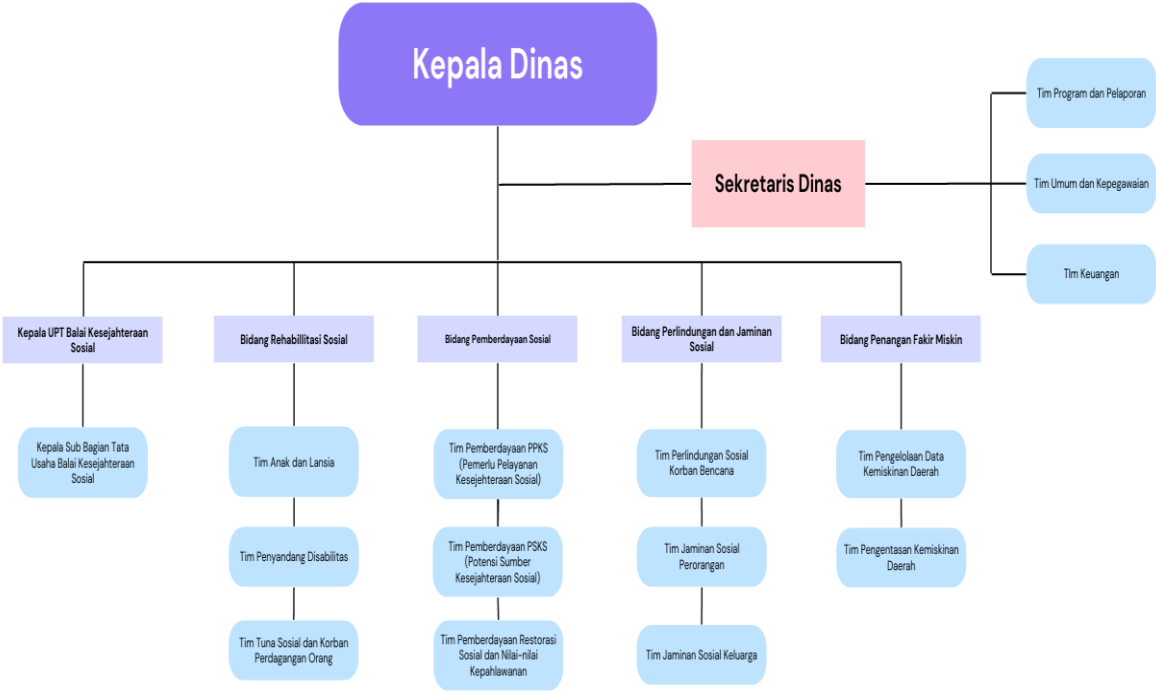
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dengan merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor pada Tahun 2026 tetap merujuk pada target RPJMD 2025-2030 Kabupaten Bogor, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2026 Dinas Sosial mengajukan perubahan SOTK menjadi 4 bidang, yaitu adanya penambahan bidang penanganan fakir miskin dengan penambahan Tim Pengelolaan Data Kemiskinan Daerah dan Tim Pengentasan Kemiskinan Daerah.

Program Perlindungan Jaminan Sosial diampu oleh 2 bidang yaitu bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator cakupan layanan orang dan anak terlantar, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan indikator Persentase masyarakat miskin dan rentan yang terfasilitasi dalam program kesejahteraan sosial. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 dapat dilihat gambar dibawah:

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tahun 2026



Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bogor oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Ada 7 Program, 16 kegiatan dan 106 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2026 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp.42.582.706.708,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 4.1.

Pada tabel 4.1 terdapat uraian mengenai Program Prioritas yang mendukung langsung Sasaran Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Fakir Miskin, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, dan Program Penanganan Bencana.

Program lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial yakni Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

BAB V

P E N U T U P

Renja Dinas Sosial tahun 2026 telah berpedoman pada substansi RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026, yang merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pada periode perencanaan jangka panjang Tahun 2025-2045 dan periode perencanaan jangka menengah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Renja Dinas Sosial Tahun 2026 disusun dan ditetapkan dengan peraturan bupati, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA sampai dengan ditetapkan menjadi DPA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026.

Untuk selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal yang telah ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Renja, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BOGOR,

RUDI SUSMANTO